

## HUBUNGAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT AUDIT REPORT LAG

(Studi Empiris pada Lembaga Perbankan Syariah Yang Terdaftar di OJK 2011-2020)

Asri Nur Rifkiyanti, Muchamad Syafruddin<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

### ABSTRACT

*This study aims to examine the level of audit report lag and its relationship with governance mechanisms in Islamic banking institutions. This study uses audit reports again as the dependent variable and governance mechanism (board independent, audit committee size, audit committee meetings, and sharia committee expertise) with the control variable, namely the size of Islamic banking institutions. The population of this study is Islamic banking institutions listed on the Otoritas Jasa Keuangan for the 2011-2020 period. using the census method, 80 samples of Islamic banking institutions were obtained with a range of years between 2011-2020. Panel data regression analysis is used to test the hypothesis in this study. The findings from this study prove that the governance mechanism variables, namely the board independent and audit committee meetings, have a significant relationship to the extent of ARL. While other variables, namely the size of the audit committee and the sharia committee expertise, have no significant relationship to the extent of ARL.*

*Keywords : Audit Report Lag, Corporate Governance, Board Independent, Bank Sharia, Sharia Committee, Annual Report*

### PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri, laporan tahunan menjadi sumber informasi yang penting di ekonomi berkembang. Di pasar modal ekonomi berkembang, informasi relatif terbatas dan memiliki jeda waktu pelaporan yang lebih panjang (Afify, 2009). Laporan keuangan yang tepat waktu sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis (Owusu-Ansah, 2000). Ketepatan waktu didefinisikan sebagai ketersediaan informasi yang tepat waktu kepada pengambil keputusan sebelum merusak nilai informasi dari laporan keuangan dimana hal ini akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka (Financial Accounting Standards Board, 2010). Dengan kata lain, manfaat yang lebih besar dari kegunaan informasi keuangan akan berkurang ketika produksi laporan keuangan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dirilis ke publik (Al-Ajmi, 2008). Menunda memberikan laporan keuangan tepat waktu dapat menyebabkan masalah risiko asimetri informasi, dimana hal ini akan meningkatkan tingkat ketidakpastian keputusan investasi dan penyebaran informasi di antara para pemangku kepentingan (ASHTON *et al.*, 1989). Akibatnya, investor yang memiliki informasi lebih banyak akan memanfaatkan kesempatan ini dengan mengorbankan investor yang kurang informasi (Jaggi & Tsui, 1999). Terjadinya kebocoran informasi, rumor, dan insider trading juga akan mempengaruhi kinerja dan efisiensi perusahaan di pasar modal (Owusu-Ansah, 2000).

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa indikator yang dapat diamati untuk memproduksi laporan keuangan yang tepat waktu adalah tingkat audit report lag (Abdullah, 2006; Afify, 2009; ASHTON *et al.*, 1989; Owusu-Ansah, 2000; Sultana *et al.*, 2015). Hal ini karena, laporan keuangan tidak dapat dirilis tanpa diaudit dan diverifikasi oleh auditor eksternal untuk mendapatkan pandangan yang benar dan adil. Dalam penelitian (Abdullah, 2006) melaporkan bahwa perusahaan yang tidak patuh dengan persyaratan penyerahan laporan keuangan menunggu

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

hingga 146 hari untuk menghasilkan laporan keuangan yang telah diaudit di Bursa Malaysia. (Afify, 2009) juga melaporkan bahwa tingkat ARL perusahaan yang terdaftar di Mesir adalah 67 hari. Selain itu, di Australia, auditor eksternal membutuhkan waktu untuk menghasilkan laporan keuangan yang telah diaudit sekitar 10 minggu (Sultana et al., 2015).

Pentingnya ARL telah memotivasi penelitian sebelumnya untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ARL seperti profitabilitas, usia dan ukuran perusahaan, jenis perusahaan audit, kualifikasi perusahaan audit dan periode musim sibuk. Mekanisme tata kelola perusahaan seperti dewan direksi (BOD), komite audit dan fungsi audit internal juga telah diteliti sebagai variabel penjelas untuk menguji hubungan tata kelola perusahaan dengan tingkat ARL di berbagai negara (Afify, 2009; Apadore & Mohd Noor, 2013; Mohamad-Nor et al., 2010; Nelson & Shukeri, 2011; Sultana et al., 2015; Wan-Hussin & Bamahros, 2013).

Tingkat ARL telah dipelajari dan diteliti dengan baik di negara maju dan negara berkembang dalam penelitian yang ada. Tetapi, peneliti menemukan masih terdapat kekurangan penelitian di masa lalu yaitu belum adanya penelitian terkait sejauh mana tingkat ARL dan mekanisme tata kelola perusahaan di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, adanya kekurangan penelitian tentang lembaga perbankan syariah telah memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menguji sejauh mana tingkat ARL dan mekanisme tata kelola perusahaan di lembaga perbankan syariah. Fakta bahwa sebagian besar lembaga perbankan syariah berlokasi di negara berkembang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan, dengan demikian penting untuk memeriksa ketepatan waktu laporan keuangan dari lembaga perbankan syariah, karena ketersediaan informasi yang tepat waktu di pasar modal yang berkembang ini akan memberikan manfaat yang besar dalam membuat keputusan bisnis).

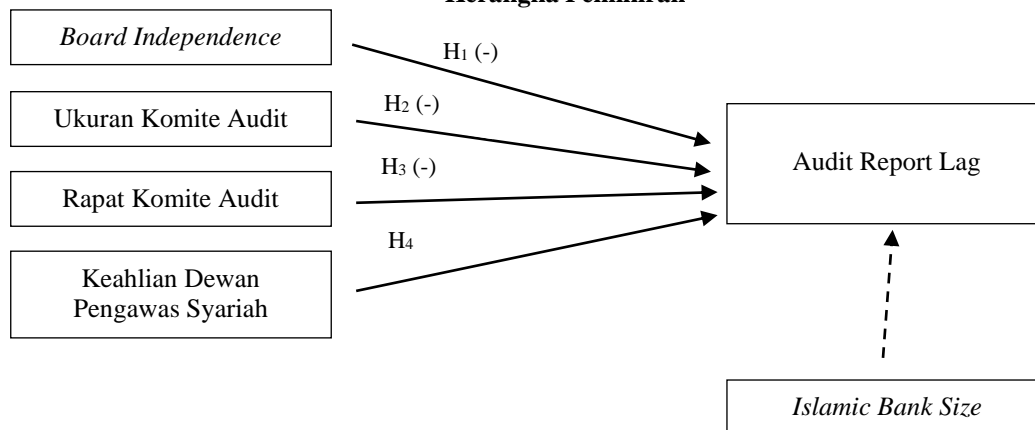
Indonesia menjadi salah satu negara terkemuka di bidang perbankan dan keuangan Islam. Dengan mempelajari konteks lembaga perbankan Islam di Indonesia, telah memberikan ruang untuk penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini perlu untuk dilakukan. Beberapa kegagalan dan isu terkait bank syariah seperti Ihlal Finans di Turki, Bank Islam di Afrika Selatan, Perusahaan Investasi Islam di Mesir, Bank Islam di Dubai, dan kasus Bank Islam yang dianggap sebagai contoh telah memotivasi untuk melakukan penyelidikan empiris lebih lanjut (Ali, 2007; Hossein Askari, Zamir Iqbal, 2009; Kulsanofer Syed Thajudeen, 2013),

Dengan menyelidiki masalah konteks lembaga perbankan syariah, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada terkait ketepatan waktu laporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian akan bermanfaat dalam memberikan umpan balik berkaitan dengan praktik pelaporan perusahaan dan mekanisme tata kelola di masa lalu dan saat ini bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan akan berguna bagi pembuat kebijakan dalam mengawasi kepatuhan penyerahan laporan keuangan lembaga perbankan syariah dan meninjau mekanisme tata kelola yang ada serta menerapkan pedoman yang sesuai untuk memperkuat kepatuhan lembaga perbankan syariah.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan memiliki struktur yang berasal dari adanya pemisahan antara pemegang saham dan kontrol (manajemen). Pemisahan antara pemegang saham dan kontrol disebut dengan hubungan keagenan (agency relationship). Hubungan ini menggambarkan adanya hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajemen). Pemisahan ini sering mengakibatkan masalah antara prinsipal dan agen yang disebut dengan masalah keagenan (agency problems) yang diakibatkan karena adanya perbedaan tujuan dan kepentingan antara prinsipal dan agen. Masalah antara prinsipal dan agen diakibatkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena prinsipal mungkin tidak dapat mengetahui apakah agen bertindak demi kepentingan terbaik mereka atau apakah agen termotivasi untuk kepentingan mereka dengan cara mengorbankan prinsipal. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang efektif agar dapat mengurangi masalah keagenan. Pengawasan yang efektif ini dapat diwujudkan dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



Kerangka pemikiran seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1 diatas menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Terdapat tiga variabel yaitu variabel dependen (audit report lag), variabel independen (Board independence, ukuran komite audit, rapat komite audit, dan keahlian dewan pengawas syariah) dan variabel kontrol berupa Islamic bank size untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias.

### Perumusan Hipotesis

#### **Board Independence**

Komposisi *board of directors* bisa dinilai kuat atau tidaknya dapat dilakukan melalui proporsi antara dewan direksi dan dewan komisaris. Selain berperan sebagai penjaga untuk melindungi para pemegang saham (*agency problems*), anggota dewan komisaris juga berperan untuk meningkatkan nilai lembaga perbankan syariah dengan pengalaman mereka. Struktur tata kelola perusahaan (contohnya dewan direksi) dinilai telah efektif jika sudah menerapkan pengawasan dan strategi perspektif yang kuat, maka ada potensi asosiasi dimana tingkat risiko terhadap perusahaan akan lebih rendah, pekerjaan audit yang lebih efisien dan perencanaan audit yang efektif (Cohen, J., Krishnamoorthy, G. and Wright, 2002; Sharma et al., 2008). Hal itu kemudian akan mempengaruhi sifat, saat, dan luasnya pekerjaan audit dengan menilai tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian (Nelson & Shukeri, 2011).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia seperti (Abdullah, 2006; Afify, 2009; Asri, 2005) mengungkapkan beberapa interaksi antara tingkat ARL dan BOD. Mereka menemukan bahwa dengan adanya anggota independen akan memiliki fungsi pengawasan yang lebih baik daripada direksi non-independen. Secara spesifik, (Afify, 2009) menegaskan bahwa ketika direksi yang memiliki presentase lebih besar dari anggota independent, pengurangan tingkat ARL akan diharapkan. Berdasarkan pembahasan tersebut, hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H1** : Independensi dewan berhubungan negatif dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah Indonesia.

#### **Atribut Komite Audit**

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komposisi komite audit setidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Knapp, 1987) menyarankan bahwa jika auditor mengamati bahwa anggota komite audit tidak dapat memahami masalah teknis, auditor akan lebih kecil kemungkinannya untuk merujuk atau melaporkan masalah tersebut (contohnya masalah audit, risiko, dan prosedur audit) kepada komite audit, dimana hal ini akan melemahkan praktik tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang rendah.

Komite audit juga memainkan fungsi pengawasan yang lebih efektif jika komite audit rutin mengadakan rapat. Hasil penelitian (Ika & Mohd Ghazali, 2012; Mohamad-Nor et al., 2010) mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan komite audit yang lebih rajin lebih mungkin untuk memproduksi pelaporan keuangan yang diaudit tepat waktu. Hal ini dikarenakan dengan semakin seringnya rapat, komite audit akan lebih mengetahui informasi terkini tentang akuntansi dan/atau audit. Oleh karena itu, masalah yang ditemukan dalam proses pelaporan keuangan dapat diidentifikasi dan diantisipasi selama rapat komite audit (Nelson & Shukeri, 2011). Konsisten dengan penelitian sebelumnya, hipotesis berikut diusulkan:

**H2:** Ukuran komite audit berhubungan negatif dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

**H3:** Rapat komite audit berhubungan negatif dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

### **Keahlian Dewan Pengawas Syariah**

Keahlian anggota dewan pengawas syariah merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dewan memberikan arahan dan bimbingan untuk lembaga perbankan Islam. Oleh karena itu, diharapkan anggota dengan kualifikasi dan latar belakang yang berbeda akan meningkatkan efektivitas dewan pengawas syariah (Ghayad, 2008).

Mengingat peran kunci dewan pengawas syariah dalam kelancaran lembaga perbankan syariah, efektivitas dewan pengawas syariah dapat dilihat sebagai bentuk lain yang dapat mempengaruhi risiko terkait manajemen lembaga perbankan syariah dan khususnya tingkat ARL melalui dimasukkannya anggota yang memiliki keahlian akuntansi/keuangan dalam komite. Dimasukkannya keahlian akuntansi/keuangan dalam dewan pengawas syariah dapat membantu komite untuk menangani masalah-masalah syariah, khususnya yang berkaitan dengan masalah akuntansi/keuangan. Keahlian dewan pengawas syariah dalam lembaga perbankan syariah dapat mempercepat proses audit syariah, oleh karena itu dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan syariah yang terkait dengan masalah akuntansi/keuangan yang harus ditangani sebelum auditor eksternal dapat mengeluarkan laporan audit.

Meskipun demikian, dapat juga dikatakan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah dengan keahlian akuntansi/keuangan juga dapat menyebabkan tingkat ARL yang lebih panjang. Hal ini karena dewan pengawas syariah mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangani masalah ketidakpatuhan syariah yang berkaitan dengan masalah akuntansi/keuangan. Karena keahliannya, dewan pengawas syariah mungkin akan melihat masalah ketidakpatuhan secara lebih rinci dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat ARL. Dalam konteks ini, teori keagenan relevan karena Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai pengawas untuk mengurangi adanya risiko asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Dewan pengawas syariah yang memiliki keahlian akuntansi/keuangan akan dapat melakukan tugas pengawasannya secara lebih efektif dibandingkan dengan yang tidak memiliki keahlian keuangan/akuntansi, khususnya dalam menangani masalah yang berkaitan dengan akuntansi/keuangan, yang mungkin memiliki dampak langsung pada laporan keuangan yang diaudit, sehingga akan berdampak pada tingkat ARL.

Terlepas dari penjelasan diatas, jelas bahwa dengan adanya keahlian dewan pengawas syariah bertujuan untuk membantu dan memberi nasihat kepada dewan, tidak hanya pada masalah syariah saja tetapi juga pada masalah teknis terkait akuntansi/keuangan pada lembaga perbankan syariah. Selain itu, kurangnya literatur yang menjelaskan bagaimana auditor eksternal mempertimbangkan risiko ketidakpatuhan syariah dalam menilai penilaian risiko audit secara keseluruhan di lembaga perbankan syariah. Atas penjelasan tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut

**H4 :** Keahlian Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia

### **METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian akan membahas desain sampel dan data yang dikumpulkan, metode analisis yang akan menjelaskan analisis regresi yang dipakai, variabel, serta pengukuran untuk setiap variabel.

### Desain Smpel dan Data Yang Dikumpulkan

Sampel hanya mencakup 8 lembaga perbankan Islam berlisensi yang terdaftar di situs web Otoritas Jasa Keuangan selama sepuluh tahun dari tahun 2011-2020. Sampel dipilih berdasarkan kriteria berikut. Pertama, studi ini menghilangkan sektor-sektor lain. Studi ini juga mengecualikan lembaga keuangan terkait lainnya (bank konvensional, perusahaan asuransi berlisensi, dan Takaful) karena lembaga keuangan tersebut memiliki persyaratan peraturan yang berbeda yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan. Kedua, cakupan periode penelitian dimulai dari tahun 2010 hingga 2020 dan secara rutin melaporkan laporan tahunan di situs web mereka.

### Metode Analisis

Analisis regresi didasarkan pada analisis data panel. Dalam penelitian ini tingkat ARL digambarkan sebagai fungsi dari variabel dependen. Sedangkan mekanisme tata kelola perusahaan digambarkan sebagai variabel independen, serta IBSIZE digambarkan sebagai variabel kontrol. Dalam mengestimasi regresi dengan menggunakan data panel digunakan tiga jenis metode, yaitu Panel Least Square (OLS), fixed effect, dan random effect. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2006; Bonsn-Ponte et al., 2008; Hashim & Abdul Rahman, 2012; Henderson & Kaplan, 2000) model OLS pada dasarnya digunakan untuk menguji variabel. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi estimasi regresi, dilakukan tes tambahan (hasil analisis regresi sebagai berikut) :

$$ARL = f (\text{Variabel mekanisme tata kelola} + \text{Variabel Kontrol})$$

$$ARL = \beta_0 + \beta_1(BIND) + \beta_2(ACSIZE) + \beta_3(ACMEET) + \beta_4(SCEXP) + \beta_5(IBSIZE) + \varepsilon$$

Dengan keterangan sebagai berikut :

- 1)  $B_0$  = koefisien kendala regresi data panel
- 2)  $B_{1-4}$  = koefisien regresi variabel mekanisme tata kelola
- 3)  $B_5$  = koefisien regresi variabel kontrol
- 4)  $\varepsilon$  = kesalahan acak

**Tabel 1 Variabel & Pengukurannya**

Variabel	Pengukuran
<i>ARL (Audit Report Lag)</i>	jumlah hari dari akhir tahun keuangan bank Islam hingga tanggal laporan audit diterbitkan
<i>BIND (Board Independent)</i>	proporsi komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris
<i>ACSIZE (Audit Committee Size)</i>	Variabel dummy, 1 untuk ukuran komite audit yang besar, 0 selain itu
<i>ACMEET (Audit Committee Meeting)</i>	jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit selama satu tahun
<i>SCEXP (Syariah committee expertise)</i>	Variabel dummy; 1 untuk anggota dewan pengawas syariah yang memiliki keahlian akuntansi yang dikombinasikan dengan pengetahuan mengenai transaksi islam, 0 selain itu.
<i>IBSIZE (Islamic Bank Intitutions Size)</i>	Ln total aset lembaga perbankan syariah

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas hasil uji dari penelitian yang telah dilakukan. Didalamnya akan dijelaskan bagaimana tingkat audit report lag bank syariah di Indonesia, statistik deskriptif, analisis korelasi, serta hasil uji dari analisis regresi yang telah dilakukan. Selain itu, akan diuraikan juga pembahasan dari masing-masing hasil uji variabel.

#### Tingkat Audit report Lag

Tabel 2 menunjukkan komposisi sampel berdasarkan pola tanggapan pelaporan. Tanggal pelaporan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu :

##### 1. *Timeliness*

### 2. Delayed

Timeliness mengacu pada lembaga perbankan syariah dengan tanggal laporan keuangan yang diaudit dalam waktu satu bulan hingga batas waktu yang ditentukan (120 hari). Sub kelompok kedua adalah sub kelompok dengan tanggal pelaporan keuangan yang diaudit melebihi 120 hari. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa semua lembaga perbankan syariah mampu memenuhi persyaratan pelaporan keuangan OJK yaitu 120 hari. Dari 80 pengamatan, semua telah mengaudit tanggal laporan tahunan yang dikategorikan sebagai “*timeliness*”, mewakili presentase tertinggi dari sampel lembaga perbankan syariah (100%). 0 pengamatan (0%) menunjukkan tanggal laporan keuangan yang diaudit yang termasuk dalam kategori “*delayed*” selama sepuluh tahun periode penelitian. Tingkat ARL di lembaga perbankan syariah memakan waktu rata-rata 52 hari

**Tabel 2 Tingkat Audit Report Lag**

Penerbitan Laporan Tahunan	N	Frequency (%)	Mean	Standar Deviasi
Tepat waktu	80	100.0	52.9	22.48
Tertunda	0	0.0	0	0
Total	80	100.0	100.0	

Sumber : Output Eviews 12, data sekunder yang diolah 2022

### Deskripsi Statistik

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif untuk keseluruhan sampel. Rata-rata tingkat ARL adalah 52 hari (standar deviasi 22 hari) dengan jeda waktu maksimal 90 hari hingga jeda waktu minimal 16 hari. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, tingkat ARL yang dilaporkan dalam penelitian ini lebih panjang daripada ARL yang dilaporkan (Henderson & Kaplan, 2000) karena mereka menemukan rata-rata ARL 23 hari. Meskipun penelitian ini agak ketinggalan zaman, temuan tersebut dapat digunakan sebagai indikator awal bahwa tingkat ARL di lembaga perbankan lebih pendek, praktis di negara maju, dibandingkan dengan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah. Salah satu alasan yang dapat membenarkan ARL yang lebih lama di lembaga perbankan syariah adalah karena risiko tambahan (risiko Syariah) dalam proses operasional. Akibatnya, tingkat ARL di lembaga perbankan syariah mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh risiko keuangan (seperti di lembaga perbankan konvensional) tetapi juga dengan dimasukkannya risiko ketidakpatuhan syariah dalam evaluasi terkait lembaga perbankan syariah oleh auditor eksternal.

Sehubungan dengan mekanisme tata kelola khusus lembaga perbankan syariah, persentase rata-rata dari independensi dewan adalah 54% dan bisa mencapai maksimal 75%. Dalam hal komposisi komite audit, 50% dari ukuran komite audit memiliki lebih dari tiga orang anggota dan 50% dari sampel memiliki anggota komite audit sebanyak tiga orang. Rata-rata jumlah rapat yang diadakan sepanjang tahun adalah 11 kali rapat. Sedangkan variabel dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa 38% memiliki setidaknya satu anggota dengan keahlian keuangan/akuntansi. Adapun variabel kontrol, rata-rata untuk ukuran lembaga perbankan syariah adalah Rp 23,26 miliar.

**Tabel 3 Statistik Deskriptif**

<i>Variabel Kontinu</i>						
Variabel	Min	Max	Mean	SD	Skewness	Kurtosis
ARL	16	90	52.9	22.49	0.06	1.84
BIND	0.33	0.75	0.54	0.10	0.13	1.83
ACMEET	3	24	11.15	5.50	0.78	2.79
IBSIZE	14.11	29.91	23.26	4.86	-0.23	1.73
<i>Variabel Dikotomi</i>						
Variabel	Category	Frequency	%	Cumulative Percent		
ACSIZE	0	40	50	50		
	1	40	50	100		
SCEXP	0	49	61.3	61.3		
	1	31	38.8	100		

Sumber : Output Eviews 12, data sekunder yang diolah 2022

Penelitian ini menggunakan Jarque-Bera Test dengan menguji nilai Skewness dan Kurtosis serta nilai probabilitas dari distribusi data. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel berdistribusi normal. Nilai distribusi data ditunjukkan pada tabel 4, menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

### Analisis Korelasi

(Gujarati, 2004) menunjukkan bahwa masalah multikolinearitas memang ada ketika nilai korelasi antar variabel independen melebihi  $> 0,8$ . Dari tabel 4 terbukti bahwa tidak ada masalah korelasi yang tinggi antara variabel independen. Seperti yang disajikan tabel 4, Variance Inflation Factor (VIF) memiliki nilai kurang dari dua untuk setiap variabel yang menunjukkan bahwa multikolinearitas bukan masalah yang berat (Jonhnston, 1984).

Tabel 4 Analisis Korelasi

	ARL	BIND	ACSIZE	ACMEET	SCEXP	IBSIZE
ARL	1	0.396414	-0.07831	-0.24549	0.012745	-0.06611
BIND		1	0.084911	-0.01026	0.030875	0.145913
ACSIZE			1	-0.02747	0.12829	0.121265
ACMEET				1	0.29292	-0.15068
SCEXP					1	0.180482
IBSIZE						1

Sumber : Output Eviews 12, data sekunder yang diolah 2022

### Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk menguji hipotesis. Karena analisis regresi melibatkan data panel, analisis *pooled regression* dilakukan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan uji Breusch-Pagan Lagrangian Multiplier (LM) untuk memastikan apakah hasil analisis *pooled regression* sudah cukup atau perlu dilakukan uji lanjutan untuk analisis data panel *fixed effects* dan *random effects* (Hsiao, 2014). Seperti yang ditunjukkan dari hasil LM, hipotesis nol diterima sebagai temuan F-statistics yang tidak signifikan (Prob. 0.6626). Dalam hal ini penelitian tidak melanjutkan untuk analisis data panel (*fixed effects* atau *random effects*). Analisis data panel *common effects* lebih dapat diterapkan untuk penelitian ini dan sesuai untuk menggambarkan pengujian hipotesis. Oleh karena itu, *common effects* mendominasi diskusi temuan berikut:

Tabel 5 melaporkan analisis *common effects*, yang menunjukkan hubungan mekanisme tata kelola untuk tingkat ARL. Nilai dari F-statistics signifikan (yaitu 5,45 dan signifikan pada 0,0002), dengan adjusted R<sup>2</sup> 21% menunjukkan bahwa model memiliki kekuatan penjelas yang baik untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan dapat disamakan dengan penelitian sebelumnya di Malaysia (Abdullah, 2006; Mohamad-Nor et al., 2010; Nelson & Shukeri, 2011).

Secara umum, hasil regresi untuk model ditunjukkan pada tabel 5. Temuan menunjukkan bahwa BIND dan ACMEET memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat ARL. Sedangkan ACSIZE dan SCEXP ditemukan tidak signifikan sehubungan dengan tingkat ARL. Berkenaan dengan variabel kontrol, IBSIZE memiliki implikasi negatif yang tidak signifikan pada tingkat ARL.

Tabel 5 Pengujian Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.91298	16.26205	2.331378	0.0225
BIND	92.40947	21.83541	4.232092	0.0001
ACSIZE	-5.295753	4.516952	-1.172417	0.2448
ACMEET	-1.282992	0.436118	-2.941849	0.0044
SCEXP	6.435248	4.942762	1.301954	0.197
IBSIZE	-0.863675	0.485604	-1.77856	0.0794
Root MSE	19.10202	R-squared		0.269298
Mean dependent var	52.9	Adjusted R-squared		0.219926
S.D. dependent var	22.48746	S.E. of regression		19.86134
Akaike info criterion	8.887465	Sum squared resid		29190.98
Schwarz criterion	9.066117	Log likelihood		-349.499
Hannan-Quinn criter.	8.959092	F-statistic		5.454484
Durbin-Watson stat	1.127946	Prob(F-statistic)		0.000251

Sumber : Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2022.

### Diskusi Hasil

Hipotesis 1 mengharapkan hubungan negatif antara independensi dewan dan tingkat ARL di lembaga perbankan syariah. Sementara itu, temuan tidak mendukung arah H1. Temuan melaporkan hubungan positif yang signifikan antara presentase independensi dewan dan ARL. Tanda positif mengartikan bahwa semakin tinggi presentase direktur independen maka semakin mungkin untuk memperpanjang ARL pada lembaga perbankan syariah. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa independensi dewan yang ada dalam komisaris independen masih belum mampu berfungsi sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan dengan maksimal (Kusumah & Manurung, 2017; Wardhani, 2014).

Hipotesis 2 memprediksi hubungan negatif antara ukuran komite audit dan tingkat ARL. Temuan penelitian ini mendukung arah H2, tetapi memiliki hubungan yang lemah. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 pasal 4 dan pasal 5 menyebutkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ARL di lembaga perbankan syariah, karena komite audit hanya bertugas sebagai pengawas dalam penyusunan laporan oleh auditor independen. Sehingga panjang atau pendeknya ARL tidak dipengaruhi oleh jumlah komite audit.

Hipotesis 3 memprediksi bahwa rapat komite audit akan mengurangi tingkat ARL di lembaga perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah rapat komite audit akan menyebabkan lembaga perbankan syariah membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang diaudit. Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian. Dengan demikian, H4 diterima. Sejalan dengan penelitian (Ika & Mohd Ghazali, 2012; Mohamad-Nor *et al.*, 2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan komite audit yang rutin melaksanakan rapat lebih mungkin untuk menghasilkan laporan keuangan yang diaudit tepat waktu. Dengan semakin seringnya rapat, maka komite audit akan dapat mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap permasalahan keuangan selama rapat komite audit berlangsung (Nelson & Shukeri, 2011).

Hipotesis 4 mewakili variabel yang menarik untuk diteliti, yaitu keberadaan keahlian keuangan/akuntansi dewan pengawas syariah. H5 ditolak karena temuan menunjukkan hubungan positif yang lemah antara dewan pengawas syariah dan ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia. Meskipun tidak signifikan, sampai batas tertentu hasilnya mendukung teori keagenan sebagai keahlian dewan pengawas syariah memainkan beberapa peran dalam proses pengawasan di lembaga perbankan syariah. Bagaimanapun, studi tersebut gagal untuk membangun bukti yang meyakinkan tentang bagaimana keberadaan keahlian dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi tingkat ARL di lembaga perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, perlu



dicatat bahwa menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2019, dewan pengawas syariah diharapkan untuk melakukan peran pengawasan dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hubungan langsung antara dewan pengawas syariah dan audit syariah dapat diobservasi, implikasinya pada perencanaan audit eksternal dan pada proses penilaian risiko audit dan tingkat ARL belum diinvestigasi.

Secara keseluruhan, studi ini secara empiris memberikan bukti yang menunjukkan bahwa ARL untuk lembaga perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola, khususnya independensi dewan dan rapat komite audit.

## **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang tingkat ARL di lingkungan yang berbeda. Secara khusus, penelitian ini mengkaji hubungan antara ARL dan mekanisme tata kelola di lembaga perbankan syariah di Indonesia. Mekanisme tata kelola diukur berdasarkan atribut, yaitu independensi dewan, komite audit (ukuran dan rapat) dan keahlian dewan pengawas syariah, sedangkan ARL diukur dengan jumlah hari dari tanggal akhir tahun buku sampai dengan tanggal tanda tangan auditor eksternal atas laporan keuangan yang telah diaudit dari lembaga perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk memandu dan menjelaskan pengembangan hipotesis dan juga untuk membuat kesimpulan tentang tingkat ARL, lembaga perbankan syariah merespon hubungan variabel mekanisme tata kelola. Penelitian ini menyelidiki laporan tahunan dari 8 lembaga perbankan syariah di Indonesia selama sepuluh tahun dari 2011 hingga 2020. Analisis dari sampel menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ARL adalah 52 hari. Temuan juga mengindikasikan bahwa independensi dewan dan rapat komite audit secara signifikan berhubungan dengan tingkat ARL. Namun, ukuran komite audit dan keahlian dewan pengawas syariah tidak secara signifikan berhubungan dengan tingkat ARL. Hasil dari penelitian ini mendukung harapan teori keagenan, karena dapat disimpulkan bahwa masalah keagenan (yaitu ARL) dapat dikurangi dengan melaksanakan rapat komite audit secara rutin, dan ini akan meningkatkan efektivitas fungsi komite audit atas proses keuangan.

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Pembuat kebijakan seperti OJK mungkin akan mengandalkan temuan untuk perbaikan di masa depan sehubungan dengan pedoman tata kelola dan pelaporan keuangan. Pertama, hasil temuan menunjukkan bahwa seluruh sampel dalam penelitian ini melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Kedua, penelitian ini juga berkontribusi untuk menyempurnakan pedoman tata kelola dengan memeriksa hubungan antara mekanisme tata kelola dan ARL. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pentingnya pelaksanaan rapat komite audit secara rutin tidak hanya dapat menjamin fungsi pemantauan yang tepat untuk memenuhi persyaratan dari OJK, tetapi juga dapat meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan di lembaga perbankan syariah (yaitu ARL).

Sama seperti penelitian lainnya, penelitian ini memiliki keterbatasan. Khususnya, diantara keterbatasan datang dari sampel yang dipilih dan pengukurannya. Temuan penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan untuk lembaga perbankan syariah karena penelitian ini mengecualikan lembaga lain dari sampel. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan mengikutsertakan lembaga lain. Perlu dicatat juga, penelitian ini hanya terfokus pada konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa di negara berbeda di mana lembaga perbankan syariah ada. Dengan demikian, temuan penelitian mungkin tidak berlaku untuk negara lain yang memiliki lingkungan organisasi dan persyaratan peraturan yang berbeda. Penelitian ini hanya menguji empat mekanisme tata kelola untuk menjelaskan hubungannya dengan ARL. Penelitian dimasa depan, dapat memperluas penelitian ini dengan menambahkan mekanisme lain untuk menguji hubungan dengan ARL. Penelitian ini tidak dapat membuat kesimpulan lebih lanjut tentang bagaimana dewan pengawas syariah mempengaruhi ARL karena data dikumpulkan dari laporan tahunan. Metodologi data lainnya, seperti wawancara dapat membantu untuk memperoleh lebih banyak wawasan tentang pengaruh mereka.

**REFERENSI**

- Abdullah, S. N. (2006). Board composition, audit committee and timeliness of corporate financial reports in Malaysia. *Corporate Ownership and Control*, 4(2 A), 33–45. <https://doi.org/10.22495/cocv4i2p3>
- Afify, H. A. E. (2009). Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. *Journal of Applied Accounting Research*, 10(1), 56–86. <https://doi.org/10.1108/09675420910963397>
- Al-Ajmi, J. (2008). Audit and reporting delays: Evidence from an emerging market. *Advances in Accounting*, 24(2), 217–226. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2008.08.002>
- Ali, S. S. (2007). Financial Distress and Bank Failure: Lessons From Closure Of Ihlas Finans in Turkey. *Islamic Economic Studies*, 14(1–2), 1–52.
- Apadore, K., & Mohd Noor, M. (2013). Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 8(15), 151–163. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n15p151>
- ASHTON, R. H., GRAUL, P. R., & NEWTON, J. D. (1989). Audit delay and the timeliness of corporate reporting. *Contemporary Accounting Research*, 5(2), 657–673. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.1989.tb00732.x>
- Asri, M. (2005). *Timeliness of financial reporting and corporate governance structure*,.
- Bonsn-Ponte, E., Escobar-Rodriguez, T., & Borrero-Domnguez, C. (2008). Empirical Analysis of Delays in the Signing of Audit Reports in Spain. *International Journal of Auditing*, 12(2), 129–140. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00375.x>
- Cohen, J., Krishnamoorthy, G. and Wright, A. . (2002). Corporate governance and the audit process. *Contemporary Accounting Research*, 19(4), 573–594.
- Financial Accounting Standards Board. (2010). Conceptual Framework for Financial Reporting: Chapter1 The Objective of General Purposes Financial Reporting; Chapter 3 Qualitative Characteristics of Useful Financial Information. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 8, September, 1–32.* <http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/PreCodSectionPage&cid=1176156317989>
- Ghayad, R. (2008). Corporate governance and the global performance of Islamic banks. *Humanomics*, 24(3), 207–216. <https://doi.org/10.1108/08288660810899368>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics*. TataMcGraw-Hill Education.
- Hashim, U. J., & Abdul Rahman, R. A. (2012). Board Independence, Board Diligence, Board Expertise and Impact on Audit Report Lag in Malaysian Market. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1717479>
- Henderson, B. C., & Kaplan, S. E. (2000). An examination of audit report lag for banks: A panel data approach. *Auditing*, 19(2), 158–174. <https://doi.org/10.2308/aud.2000.19.2.159>
- Hossein Askari, Zamir Iqbal, A. M. (2009). *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*. 753.
- Ika, S. R., & Mohd Ghazali, N. A. (2012). Audit committee effectiveness and timeliness of reporting: Indonesian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 403–424. <https://doi.org/10.1108/02686901211217996>
- Jaggi, B., & Tsui, J. (1999). Determinants of audit report lag: Further evidence from Hong Kong. *Accounting and Business Research*, 30(1), 17–28. <https://doi.org/10.1080/00014788.1999.9728921>
- Jonhnston, J. (1984). *Econometric Methods*. McGraw-Hill, London.
- Knapp, M. C. (1987). An empirical study of audit committee support for auditors involved in technical disputes with client management. *The Accounting Review*, 62(3), 578.
- Kulsanofer Syed Thajudeen. (2013). Issues in Corporate Governance in Islamic Financial Institutions : A case study on Bank Islam. *INCEIF Working Paper*, 1–15.
- Kusumah, R. W. R., & Manurung, D. (2017). Pentingkah Good Corporate Governance bagi Audit Report Lag? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 204, 137–148. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7047>
- Mohamad-Nor, M. N., Shafie, R., & Wan-Hussin, W. N. (2010). <8. Mohamad Naimi Mohamad-Nor.pdf>. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 57–84. <http://web.usm.my/journal/aamjaf/vol 6-2-2010/6-2-4.pdf>



- Nelson, S. P., & Shukeri, S. N. (2011). Corporate governance and audit report timeliness: Evidence from Malaysia. *Research in Accounting in Emerging Economies*, 11(1), 109–127. [https://doi.org/10.1108/S1479-3563\(2011\)0000011010](https://doi.org/10.1108/S1479-3563(2011)0000011010)
- Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: Empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. *Accounting and Business Research*, 30(3), 241–254. <https://doi.org/10.1080/00014788.2000.9728939>
- Sharma, D. S., Boo, E., & Sharma, V. D. (2008). The impact of non-mandatory corporate governance on auditors' client acceptance, risk and planning judgments. *Accounting and Business Research*, 38(2), 105–120. <https://doi.org/10.1080/00014788.2008.9663324>
- Sultana, N., Singh, H., & Van der Zahn, J. L. W. M. (2015). Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag. *International Journal of Auditing*, 19(2), 72–87. <https://doi.org/10.1111/ijau.12033>
- Wan-Hussin, W. N., & Bamahros, H. M. (2013). Do investment in and the sourcing arrangement of the internal audit function affect audit delay? *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(1), 19–32. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2012.08.001>
- Wardhani, A. (2014). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 766–778.